



Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong berjalan mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta.

KR-Antara/Rivan Awal Lingga

DITETAPKAN TERSANGKA DAN DITAHAN

Anies dan Cak Imin Semangati Tom Lembong

JAKARTA (KR) - Penetapan sebagai tersangka terhadap TTL alias Tom Lembong yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah murni penegakan hukum. Dalam penegakan hukum yang dilakukan penyidik Jampidis Kejagung tentunya sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup. "Karena itu saya menyatakan bahwa penanganan perkara terkait importasi gula ini, tidak ada politisasi hukum. Namun, ini murni ini penegakan hukum," jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum

(Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (30/10). Seperti diketahui, TTL telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015-2023 di Kementerian Perdagangan. Untuk kebutuhan penyelidikan, TTL saat ini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Terkait kasus tersebut, Harli me-

nyatakan bahwa proses penyidikan kasus ini sudah berjalan selama sekitar satu tahun, sejak Oktober 2023. Jadi, selama setahun itulah, penyidik terus melakukan penggalian, pengkajian, dan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. "Dan sekecil apa pun bukti terkait ini, terus dianalisis, disandingkan, dan diintegrasikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti yang cukup," papar Harli Siregar. * Bersambung hal 7 kol 1



Analisis The Chilean Paradox Arya Jodilistyo

PERTUMBUHAN ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi pemerataan kesejahteraan tidak menjamin suatu negara atau daerah dapat terhindar dari krisis. Cile menjadi salah satu contohnya. Dalam dua dekade terakhir, Cile pernah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika. Namun pada tahun 2019, terjadi kerusuhan sosial yang luas di Cile yang dipicu ketidakpuasan masyarakat kelas menengah terhadap kebijakan pemerataan kesejahteraan yang justru membuat ketimpangan semakin nyata (the Chilean Paradox). Fenomena tersebut menjadi pembelajaran bahwa krisis dapat dipicu dari berbagai faktor, untuk itu diperlukan upaya inovasi kebijakan hingga lingkup daerah termasuk DIY. Pada tahun 2023, DIY mencatatkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa bahkan lebih tinggi dibandingkan Nasional, mencapai 5,07% (yoy). Kinerja positif perekonomian DIY terus berlanjut hingga triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 4,95% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding * Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:26	14:39	17:37	18:48	03:53

Kamis, 31 Oktober 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DALAM 100 HARI KERJA Pindad Targetkan Produksi 5.000 Maung

JAKARTA (KR) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto mengatakan, PT Pindad (Persero) ditargetkan untuk memproduksi 5.000 unit mobil Pindad Maung dalam 100 hari kerja. Menurutnya, mobil tersebut bakal menjadi kendaraan dinas pejabat Kabinet Merah Putih hingga Eselon I di kementerian dan menjadi kendaraan dinas yang diwajibkan. "Untuk program itu (produksi) 10.000 ke depan. Untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut," kata Putranto setelah menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10). Ia mengatakan, mobil yang semula merupakan kendaraan taktis untuk prajurit itu kini sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 70 persen. "Yang 30 persen itu (komponen) dari Korea, Mercy (Mercedes), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka," katanya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Anggota Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero). Semangat yang ingin digelorkan Presiden Prabowo Subianto adalah Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri. "Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta. * Bersambung hal 7 kol 1

RIBUAN BURUH BAKAL GELAR AKSI Hari Ini, Putusan MK Soal UU Ciptaker

JAKARTA (KR) - Ribuan buruh bakal mengawal pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 40 tentang Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kamis (31/10). Total ada 6.000 hingga 10.000 buruh dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang akan datang melakukan aksi jelang putusan majelis hakim di Sidang Mahkamah Konstitusi nantinya. Koordinator Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) R Abdullah di Jakarta, Rabu (30/10) mengatakan, Gekanas merupakan gerakan aliansi dari 18 serikat pekerja yang mengajukan judicial review kepada ha-



Koordinator Presidium Gekanas R Abdullah bersama perwakilan aliansi serikat pekerja saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (30/10).

kim konstitusi agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja dan kembali kepada regulasi awal. "Kami berharap majelis hakim buat keputusan seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat pekerja," tandasnya. Abdullah mengatakan, UU Cipta Kerja sangat di-

tolak oleh pekerja karena membuat ketidakpastian dalam dunia kerja dan merugikan pekerja. Gekanas menyimpulkan UU Cipta Kerja mendegradasi nilai-nilai yang ada di aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. * Bersambung hal 7 kol 5

PERBAIKAN TATA KELOLA GURU Fokus Peningkatan Mutu-Kesejahteraan

JAKARTA (KR) - Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah agar memperbaiki tata kelola guru menjadi suatu sistem yang berfokus pada peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. "Komisi X DPR RI mendorong perbaikan tata kelola guru menjadi satu sistem yang berkeadilan serta berfokus pada mutu dan kesejahteraan guru," kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X mengenai Pendidikan Dasar dan Menengah di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (30/10). Tata kelola guru merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan guru sebagai tenaga profesional untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dorongan tersebut pun merupakan salah satu hasil kesimpulan rapat yang diikuti sejumlah pihak, antara lain perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Pengurus Koalisi Pendidikan Nasional, Koordinator Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (KOPAJA), serta Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Sebelumnya, dalam rapat tersebut, KOPAJA merekomendasikan sejumlah hal kepada DPR dan Pemerintah terkait pengembangan pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air. Rekomendasi tersebut di antaranya, KOPAJA mendorong perbaikan tata kelola guru dan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) * Bersambung hal 7 kol 5

UJI MATERI TENTANG UU PEMILU Tanpa 'Presidential Threshold', Pilpres Bisa Dua Putaran



Tangkapan layar - Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menyampaikan keterangan DPR dalam sidang lanjutan pengujian materi Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jakarta, Rabu (30/10). Syarat kebijakan hukum terbuka, jelas Martin, adalah jika suatu norma tidak dirumuskan secara tegas pada UUD NRI Tahun 1945, dideklasifikasi dan diatur lebih lanjut dalam

ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 222 UU Pemilu juga merupakan tindak lanjut Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yakni pasal yang mengatur syarat untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jika tidak ada presidential threshold, maka syarat yang diatur konstitusi akan sulit dicapai. "Dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam dua putaran yang berimplikasi pada beban negara, terutama berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian ketentuan pasal a quo telah memenuhi rasionali-

tas dalam penerapan open legal policy," kata Martin. * Bersambung hal 7 kol 1



● SABTU 31 Agustus 2024, sahabat saya indigo yang dikaruniai kelebihan, bercerita kalau setiap hari melihat 7-8 tuyul lewat depan rumahnya, meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu. Menurutnya, wujud asli tuyul itu panjang tangannya dua kali tangan orang normal, badannya besar tetapi kakinya kecil. Jauh berbeda dengan tuyul di film. (Mehartin, Joyonegaran MG 2/946 RT 42 RW 13 Mergasan, Yogyakarta 55151)-d